

KARAKTERISTIK PETANI DALAM PEMANFAATAN PUPUK SUBSIDI DI PROPINSI RIAU

RINI NIZAR DAN ANTO ARIYANTO
Staf Pengajar Universitas Lancang Kuning
Program Studi Agribisnis
Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai-Pekanbaru

ABSTRAK

Pertanian merupakan aspek pendukung sangat penting bagi ketersediaan pangan. Salah satu kebijakan ini adalah kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dengan memberikan subsidi input berupa penetapan HET pupuk. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan enam indikator keberhasilan yaitu tepat jenis, jumlah, harga, mutu, tempat, dan waktu. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan karakteristik petani dalam memanfaatkan kebijakan pupuk subsidi untuk usahatani. Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok petani yang menggunakan pupuk bersubsidi cenderung lebih berpendidikan dibandingkan pada responden petani pada kelompok yang tidak menggunakan pupuk bersubsidi. Indikasi ini menunjukkan bahwa petani yang berpendidikan cenderung lebih baik dalam memperoleh informasi terhadap pupuk bersubsidi, dan pemanfaatan pupuk subsidi yang menghasilkan produksi tertinggi pada luasan 0,5 – 0,749 hektar.

Kata kunci : Subsidi Pupuk, Efektifitas, Persediaan Beras

PENDAHULUAN

Beras merupakan salah satu makanan pokok bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perhatian akan beras atau tanaman padi tidak ada henti-hentinya. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan produktivitas usahatani. Oleh karena itu sejarah keberhasilan penyediaan pangan terutama beras banyak ditentukan oleh keberadaan pupuk (Widodo, 2008). Pentingnya peranan pupuk dalam sistem produksi pertanian menjadikan pemerintah selalu memberikan

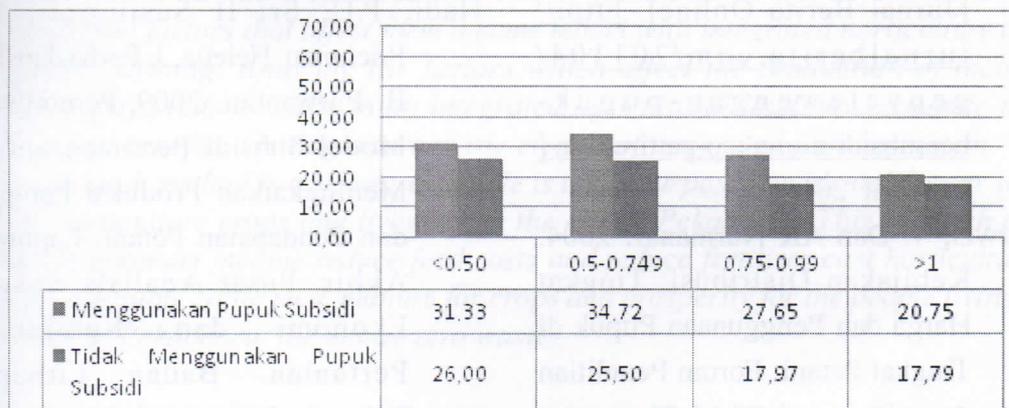
perhatian serius serta mengeluarkan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Tujuan kebijakan pada dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sehingga produktivitas usahatani dapat meningkat (Veleriana dan A. Rozany Nurmanaf, 2004).

Kebijakan subsidi pupuk sebagai salah satu dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan pada petani

kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi padi setiap tahunnya mengingat adanya keterbatasan lahan dan bahkan semakin menyempit serta dengan semakin banyaknya peningkatan jumlah penduduk yang ada yang menggeser fungsi lahan dan meningkatkan permintaan kebutuhan pangan.

Namun Hal yang menarik untuk dikaji adalah rata-rata produksi dari responden petani yang tidak menggunakan pupuk subsidi (diwakili

dari Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan) lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi dari responden yang menggunakan pupuk subsidi. Fakta ini diduga kondisi lahan dan agroekologi yang sesuai dengan kebutuhan usahatani padi di daerah tersebut. Hal ini didukung pula oleh kebiasaan petani di daerah tersebut yang tidak menggunakan pupuk dalam berusahatani padi yang dilakukan secara turun-temurun di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.



Gambar 7. Rata-rata Produktivitas Responden per Musim Panen (Ku/Ha)

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat pendidikan responden yang lebih tinggi cenderung lebih menggunakan pupuk bersubsidi. Indikasi ini menunjukkan bahwa petani yang berpendidikan cenderung lebih baik dalam memperoleh informasi terhadap pupuk bersubsidi.
2. Pemanfaatan pupuk subsidi yang menghasilkan produksi tertinggi pada luasan 0,5 – 0,749 hektar.

3. Mekanisme penyaluran pupuk subsidi relatif panjang dan rumit menyebabkan sering terkendalanya ketersediaan pupuk di tingkat petani pada saat dibutuhkan.

Saran

1. Pemerintah perlu membuat peraturan untuk menyederhanakan mekanisme distribusi pupuk subsidi agar dapat membantu ketersediaan pupuk subsidi bagi petani

2. Peran penyuluhan dan pertemuan kelompok tani perlu dioptimalkan untuk dapat menyebarkan informasi yang dapat meningkatkan produksi pertanian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), 2011. Harga Eceran Tertinggi Pupuk di Indonesia 1988 – 2010. APPI, Jakarta.
- Cholid, I. 2011. Penyelewengan Pupuk Bersubsidi diungkap Pattiro. [Jurnal Berita Online]. <http://jurnalberita.com/201104/penyelewengan-pupuk-bersubsidi-diungkap-pattiro.htm> [26 April 2011]
- Darwis, V. Dan AR Nurmanaf. 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 22:63-73.
- Darwis, V. Dan C. Muslim. 2007. Revitalisasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15: 141-168.
- Depta, 2006. Model Subsidi Pertanian Terpadu : Landasan Konseptual dan Faktual serta Sistem Operasinya.
- Firdaus, M.L, M Baga dan P Pratiwi, 2008. Swasembada Beras dari Masa ke Masa (Telaah efektivitas Kebijakan dan Perumusan Strategi Nasional). IPB Press. Bogor.
- Handoko, R dan P Patriadi. 2005. Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. Kajian Ekonomi dan Keuangan. 9: 42-64.
- Hadi, P.U., Dewa KS. Swastica, Frans B.M. Dabukke, D. Hidayat, Nur K. Agustin dan M. Maulana. 2007. "Analisis Penawaran dan Permintaan Pupuk di Indonesia 2007-2012. Laporan Teknis Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Hadi, P.U, Sri H Susilowati, B. Rachman, Helena, J. Purba dan Tri B. Purwantini. 2009. Perumusan Model Subsidi Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Pangan dan Pendapatan Petani. Laporan Akhir. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian Bogor.
- Rachman B. 2009. Kebijakan Subsidi Pupuk : Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. Analisis Kebijakan Pertanian. 7 : 131-146.
- Suryana, A. 2006. Menyikapi Isu dan Dampak Lingkungan di Sektor Pertanian. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pertanian melalui Pendekatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara Terpadu. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 28 Maret 2006 di Solo.